

PENGUNAAN SURAT KETERANGAN PELEPASAN TANAH ADAT

UNTUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

Lengkap Di Kota Jayapura Provinsi Papua

oleh: Lirian Sananta Puhesstra¹, Dr. Rikardo Simarmata, S.H.²

INTISARI

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah tanah adat Kota Jayapura masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya dalam penggunaan Surat Keterangan Pelepasan Tanah Adat (SKPTA) sebagai dasar awal pendaftaran tanah. SKPTA merupakan dokumen yang dibuat oleh otoritas adat sebagai bukti pelepasan hak ulayat masyarakat adat kepada pihak perseorangan untuk kemudian didaftarkan dalam sistem hukum pertanahan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi SKPTA dalam pelaksanaan PTSL di Kota Jayapura serta mengidentifikasi kendala-kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan empiris, yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKPTA berfungsi sebagai bukti awal pelepasan hak ulayat, sarana legitimasi adat, serta dasar verifikasi administratif bagi Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan PTSL. Namun, dalam praktiknya fungsi SKPTA belum dapat dilaksanakan secara efektif karena belum ada standarisasi format SKPTA, contohnya SKPTA yang tidak memuat uraian batas-batas wilayah tanah adat yang dilepaskan secara jelas dan terperinci, serta tidak dilengkapi dengan peta sketsa sebagai petunjuk spasial yang memadai, sehingga menyulitkan proses verifikasi administratif, pengukuran, dan pemetaan dalam pelaksanaan PTSL. Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan pemetaan partisipatif wilayah tanah adat, terjadinya tumpang-tindih klaim tanah antar masyarakat adat, serta lemahnya koordinasi antara lembaga adat, pemerintah daerah, dan Kantor Pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi SKPTA melalui penyusunan standar administratif, pengembangan pemetaan partisipatif tanah adat, serta peningkatan koordinasi dan kapasitas kelembagaan guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat di Kota Jayapura.

Kata Kunci: Surat Keterangan Pelepasan Tanah Adat, PTSL, Tanah Adat, Fungsi Alas Hak, Kota Jayapura.

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Departemen Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

**“The Use of Customary Land Release Certificate in the
Implementation of Systematic Complete Land Registration in Jayapura
City, Papua Province.”**

By : oleh: Lerian Sananta Puhesstra³, Dr. Rikardo Simarmata, S.H.⁴

ABSTRACT

The implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap/PTSL) in customary land areas of Jayapura City continues to face various challenges, particularly in the use of the Customary Land Release Certificate (Surat Keterangan Pelepasan Tanah Adat/SKPTA) as an initial basis for land registration. SKPTA is a document issued by customary authorities as evidence of the release of indigenous communal land rights to individuals for subsequent registration within the national land law system. This research aims to analyze the function of SKPTA in the implementation of PTSL in Jayapura City and to identify obstacles that affect the effectiveness of its function. This study employs a normative-empirical research method, using statutory and empirical approaches, conducted through literature review and interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that SKPTA functions as preliminary evidence of the release of communal land rights, a means of customary legitimacy, and a basis for administrative verification by the Land Office in the implementation of PTSL. However, in practice, the function of SKPTA has not been effectively carried out due to the absence of standardized SKPTA formats, including instances where SKPTA does not clearly and comprehensively describe the boundaries of the released customary land and is not accompanied by sketch maps providing adequate spatial guidance. These deficiencies complicate administrative verification, land measurement, and mapping processes within PTSL. This situation is further exacerbated by limited participatory mapping of customary land areas, overlapping land claims among indigenous communities, and weak coordination among customary institutions, local governments, and the Land Office. Therefore, strengthening the function of SKPTA through the establishment of administrative standards, the development of participatory customary land mapping, and the enhancement of institutional coordination and capacity is necessary to ensure legal certainty and the protection of indigenous customary land rights in Jayapura City.

Keywords: Customary Land Release Certificate, PTSL, Customary Land, Function as Legal Basis, Jayapura City.

³ Student of the Department of Agrarian Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

⁴ Lecturer of the Department of Agrarian Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada